

Gubernur Anwar Hafid Resmikan Command Center BERANI Samporoa

SULTENG RAYA – Di penghujung akhir tahun 2025, Gubernur Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido secara resmi meresmikan Command Center layanan BERANI Samporoa Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu malam (31/12/2025).

Peresmian yang berlangsung di lantai III Kantor Gubernur Sulawesi Tengah tersebut menjadi tonggak penting transformasi digital pelayanan publik, sekaligus wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menghadirkan layanan yang lebih cepat, responsif, dan transparan bagi masyarakat.

Gubernur dan Wakil Gubernur didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo Sulteng) Suandi, bersama sejumlah kepala OPD ling-

kup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Command Center BERANI Samporoa berfungsi sebagai pusat pengelolaan laporan dan aduan masyarakat berbasis sistem digital. Setiap laporan yang masuk akan dikelola oleh operator Command Center dan diberikan nomor tiket, sehingga seluruh proses penanganan dapat dipantau secara real time.

Operator akan memberikan respons awal kepada masyarakat. Apabila laporan dapat diselesaikan langsung, maka akan di-

Baca GUBERNUR Hal. 7



PERESMIAN Command Center layanan BERANI Samporoa Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu malam (31/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Pemkab Donggala Kumpulkan Donasi Rp300 Juta untuk Bencana Sumatra



BUPATI DONGGALA Vera Elena Laruni (dua dari kiri) bersama Kapolres Donggala dan unsur Forkopimda lainnya melakukan doa bersama sekaligus menggalang donasi untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada perayaan malam tahun baru 2026. FOTO: ANTARA/PEMKAB DONGGALA

SULTENG RAYA – Pemerintah Kabupaten Donggala, berhasil menghimpun Rp300 juta donasi aparat sipil negara (ASN) dalam rangkaian perayaan malam tahun baru 2026 untuk diserahkan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatra.

Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan pentingnya solidaritas antarsesama khususnya bagi masyarakat yang sedang

tertimpa bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Tentunya solidaritas antarsesama manusia sangat penting untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, apalagi saat Sulawesi Tengah khususnya Pasigala dilanda bencana gempa bumi dan likuifaksi 2018 silam

Baca PEMKAB Hal. 7

Pemprov Sulteng Salurkan Bantuan 12 Ambulans untuk Rumah Ibadah

SULTENG RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyalurkan bantuan 12 unit mobil ambulans untuk sejumlah rumah ibadah dan yayasan keagamaan.

“Kita ingin pelayanan kesehatan semakin maksimal. Bukan hanya gratis berobat, tetapi juga mudah mengakses layanan. Dengan ambulans ini, masyarakat tidak lagi kesulitan saat harus dirujuk atau dalam kondisi darurat,” kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid di Palu, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan operasional ambulans sepenuhnya berada di tangan masing-masing penerima. Namun, ia meminta agar penerima tetap



GUBERNUR SULTENG Anwar Hafid bersama penerima bantuan ambulans di Kota Palu, Rabu (31/12/2025). FOTO: ANTARA/HUMAS PEMPROV SULTENG

mengutamakan prinsip kemanusiaan dan tidak membatalkan masyarakat yang membutuhkan layanan.

“Yang penting jangan terlalu membebani masyarakat. Operasional seperti BBM tentu perlu biaya, tetapi harus diatur secara bijak agar tetap terjangkau,” ujarnya.

Menurut dia, kehadiran ambulans itu bertujuan memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di desa-desa dan wilayah terpencil. Ia menekankan bahwa Program Berani Sehat tidak hanya menghadirkan pengobatan gratis, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh kemudahan transportasi

Baca PEMPROV Hal. 7

Kemenkum Sulteng Kawal Pendaftaran Kekayaan Intelektual IG Kopi Arabika Dombu



SULTENG RAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kemenkum Sulteng) mengawal proses pendaftaran kekayaan intelektual Indikasi Geografis (IG) Kopi Arabika Dombu Sigi.

Kepala Kantor Wilayah Hukum Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy dalam keterangannya di Palu, Jumat, menyampaikan bahwa Kopi Arabika Dombu Sigi di Kabupaten Sigi memiliki potensi besar menjadi ikon ekonomi baru Sulawesi Tengah.

“Kopi Arabika Dombu Sigi bukan hanya produk pertanian, tetapi identitas

geografis yang mencerminkan karakter masyarakat dan potensi daerah. Melalui Indikasi Geografis, nilai tambahnya dapat meningkat dan memberikan kesejahteraan lebih bagi petani,” ujarnya.

Baca KEMENKUM Hal. 7

Lakalantas di Parigi Moutong Renggut 72 Nyawa

SULTENG RAYA – Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Parigi Moutong sepanjang tahun 2025 menyisakan duka. Sedikitnya 72 orang meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan raya, meningkat sekitar sembilan persen dibandingkan tahun 2024 yang mencatat 66 korban jiwa.

Data tersebut disampaikan Kapolres Parigi Moutong, AKBP Dr. Hendrawan A.N., S.I.K., M.H. saat konferensi pers pengungkapan kasus sepanjang tahun 2025 di Mako Polres Parigi Moutong, Rabu (31/12/2025).

“Angka fatalitas kecelakaan masih menjadi perhatian serius. Meski jumlah kasus menurun, namun korban meninggal dunia justru mengalami peningkatan,” ungkap Kapolres.

Selain korban meninggal, jumlah korban luka berat juga mengalami kenaikan.



Pada tahun 2024 tercatat 79 orang, sementara di tahun 2025 meningkat menjadi 81 orang atau naik tiga persen. Sebaliknya, korban luka ringan menurun dari 139 orang pada tahun 2024 menjadi 130 orang di tahun 2025.

Baca LAKALANTAS Hal. 7

Tarif Listrik Triwulan I 2026 Tidak Naik, PLN Jaga Keandalan dan Kualitas Layanan

SULTENG RAYA – PT PLN (Persero) mendukung penuh keputusan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menetapkan tarif listrik pada Triwulan I (Januari-Maret) 2026 tidak mengalami kenaikan.

Perseroan juga menegaskan dukungan tersebut melalui komitmen untuk terus menjaga keandalan dan kualitas layanan kelistrikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga

bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

“Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan,” jelas Tri.

Lebih lanjut, Tri menyampaikan bahwa tarif tenaga listrik bagi 25 golongan pelanggan tidak mengalami perubahan, dengan subsidi listrik tetap diberikan. Kebijakan ini memberi ruang bagi masyarakat dan Usaha



KEHADIRAN energi listrik yang andal dan terjangkau berdampak positif bagi daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. FOTO: PLN

Baca TARIF Hal. 7

Tim Patroli Dialogis Menyasar Wisata Air Panas Marowo

SULTENG RAYA – Mengawali tahun baru 2026, Polsek Ulubongka bergerak memastikan keamanan wilayah melalui patroli dialogis, Kamis (1/1/2026) pagi. Personel Polsek menyisir sejumlah titik keramaian, dengan fokus utama di objek wisata air panas Desa Marowo, Kecamatan Ulubongka, Kabupatena Tojo Una-una (Touna).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.30 Wita ini dikawal langsung dua personel, Aipda Jubrin Supu dan Briпка Rianto. Selain memantau situasi keamanan, petugas secara aktif berinteraksi dengan pengunjung dan warga setempat untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas.

Dalam keterangannya, Kapolsek Ulubongka, Iptu Muhajir Wonti menegaskan kehadiran polisi di tengah masyarakat, khususnya di lokasi wisata, bertujuan untuk men-

ciptakan rasa aman serta menekan potensi tindak kriminalitas.

“Kami menginstruksikan anggota untuk memberikan imbauan langsung kepada pengunjung di wisata air panas Marowo. Fokus kami adalah memastikan warga tetap waspada dan bersama-sama menjaga ketertiban,” ujar Kapolsek.

Lebih lanjut, Kapolsek meminta warga diminta menjauhi segala bentuk tindakan melanggar hukum yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan berperan serta menjaga lingkungan masing-masing demi terciptanya situasi yang kondusif.

“Melalui patroli dialogis yang intensif seperti ini, kami berharap dapat meminimalisir niat maupun kesempatan bagi pelaku kejahatan. Laporan ke Polsek Ulubongka jika melihat atau mengalami gangguan keamanan,” tutupnya. **AMR**



TIM Patroli Dialogis, saat menemui sejumlah pengunjung di area Wisata Air Panas Desa Marowo, Kecamatan Ulubongka, Kamis (1/1/2026). **FOTO:** DOK. POLSEK ULUBONGKA

Seorang Kakek Ditemukan Gantung Diri di Pohon

SULTENG RAYA – Seorang kakek usia 75 tahun, ditemukan tewas gantung diri di sebuah pohon di Desa Mayayap. Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai. Peristiwa tragis itu diketahui terjadi pada Kamis (1/1/2026) sore.

Kapolsek Bualemo, Iptu Alwi Polii mengatakan, dari informasi yang diperoleh dari saksi, bahwa korban sebelumnya pada Rabu (31/12/2025) sekira pukul 10.00 wita,berpamitan kepada anaknya untuk keluar rumah.

“Saat itu korban berpesan agar tidak usah mencarinya. Anak korban pun menaruh curiga dengan perkataan sang kakek,” jelas kapolsek.

Hingga Kamis (1/1/2026) pagi, korban tak jua kembali ke rumah, sehingga pihak keluarga memutuskan melakukan pencarian, namun tak membuahkan hasil. Hilangnya korban pun dilaporkan ke pemerintah desa setempat dan Bhabinkamtibmas Polsek Bualemo, lalu dilakukan pencarian bersama pada pukul 13.00 Wita. korban berhasil ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan posisi gantung di pohon mangga.

“Korban ditemukan di Dusun III Bombana Desa Mayayap. Selanjutnya dievakuasi menuju kerumah duka,” tutur Alwi.

Dari hasil pemeriksaan awal di lokasi, diketahui

bahwa jarak dari cabang pohon ke tahan sekitar 1,5 meter, dengan panjang tali sekitar 1 meter. Pihak keluarga korban menyatakan menolak dilakukan autopsi dan bersedia membuat berita acara penolakan.

“Akan tetapi, kepolisian tetap melakukan pendalaman guna memastikan tidak adanya unsur pidana lain dalam peristiwa tersebut,” kata kapolsek..

Menurut kapolsek, peristiwa meninggalnya kakek tersebut dengan cara gantung diri menjadi peringatan kepada kita semua. bahwa persoalan keselamatan dan kesehatan mental tidak bisa dianggap sepele. **AMR**



PIHAK Polsek Bualemo, saat menemui pihak keluarga terkait dengan ditemukannya seorang kakek meninggal dunia dengan cara gantung diri di sebuah pohon, Desa Mayayap, Kamis (1/1/2026). **FOTO:** IST



PERSONEL Sat Lantas Polres Sigi, saat melaksanakan patroli blue light, guna mengantisipasi balapan liar pada malam hari dan pengaturan arus lalu lintas, beberapa waktu lalu. **FOTO:** SATLANTAS SIGI

Kasus Laka Lantas di Sigi Meningkat

SULTENG RAYA – Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sigi, sepanjang tahun 2025, telah terjadi kasus kecelakaan laku lintas (laka lintas) sebanyak 83 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2024), yakni 77 kasus laka lintas.

Kapolres Sigi, AKBP Kari Amsah Ritonga mengatakan, dari jumlah kasus laka lintas itu, yang berhasil diselesaikan sebanyak 73 kasus (87 persen). Dia melanjutkan, berdasarkan lokasi kejadian, lokasi rawan

kecelakaan terbanyak berada di ruas Jalan Desa Lolu yakni terjadi 10 TKP (tempat kejadian perkara) dan Desa Kalukubula terjadi 9 TKP, Kecamatan Sigi Biromaru.

“Data ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan upaya pencegahan, pengaturan, dan edukasi keselamatan berlalu lintas, serta menjadi dasar perumusan langkah preventif ke depan,” kata kapolres.

Kapolres Sigi menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polres Sigi dan Polsek jajaran, pemerintah daerah, TNI, serta masyarakat atas

sinergi selama 2025. Ia menegaskan komitmen Polres Sigi untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan pada tahun 2026.

Dia juga tak lupa mengimbau kepada masyarakat, agar senantiasa menjaga ketertiban saat berkendara, melengkapi peralatan kendaraan seperti kaca spion, surat-surat kendaraan dan penggunaan helem SNI.

“Kita harapkan tingginya angka laka lintas menjadi perhatian kita semua, demi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan Kamselftincar lintas,” tutup kapolres. **AMR**



SEJUMLAH personel Polsek Damsol, saat melakukan pengaturan lalu lintas di Jalur Palu-Tolitoli, Dusun IV Desa Sabang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala usai tertimbun longsor, Jumat (1/1/2025). **FOTO:** DOK POLSEK DAMSOL

Longsor di Jalur Palu-Tolitoli, Polsek Damsol Terjunkan Personel

SULTENG RAYA - Curah hujan yang tinggi mengakibatkan material tanah dan batu menutupi badan Jalan Trans Poros Palu-Tolitoli, tepatnya di Dusun IV Desa Sabang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, yang terjadi pada Selasa (30/12/2025), keesokan harinya Rabu (31/12/2025) Polsek Dampelas Sojol (Damsol) bersama instansi terkait melaksanakan kegiatan pembersihan material longsor, guna memulihkan akses lalu lintas yang sempat terganggu.

“Dalam proses pembersihan, diturunkan satu unit alat berat berupa excavator mini untuk mempermudah pengangkatan material tanah dan batu yang menutupi badan jalan,”

kata Kapolsek Damsol, Iptu Edi Susilo, Jumat (1/1/2026).

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya cepat Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan Trans Palu-Tolitoli yang merupakan jalur vital penghubung antarwilayah.

Selama kegiatan berlangsung, personel Polsek Damsol diterjunkan untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian.

Pengaturan ini dilakukan untuk menjaga keselamatan para pengendara yang melintas serta menghindari kemacetan di jalur trans tersebut.

Berkat kerja sama dan respons cepat di lapangan, proses pembersihan material longsor dapat teratasi. Saat ini, badan jalan yang sebelumnya

tertimbun material tanah dan batu sudah dapat dilalui kembali kendaraan baik roda maupun roda empat.

Kapolsek menyampaikan bahwa situasi arus lalu lintas di lokasi kejadian terpantau dalam keadaan aman, lancar, dan kondusif.

Ia juga mengimbau kepada para pengguna jalan agar tetap berhati-hati, khususnya saat melintasi wilayah rawan longsor di musim penghujan.

“Polsek Damsol akan terus memantau situasi dan siap melakukan langkah cepat apabila terjadi gangguan kamtibmas maupun hambatan lalu lintas akibat kondisi cuaca,” ujar Edi.

Dengan dibukanya kembali akses jalan tersebut, aktivitas masyarakat dan arus transportasi Palu-Tolitoli dapat kembali berjalan normal. **AMR**

Dekopinwil Sulteng Tegaskan Komitmen Kemandirian Koperasi 2026



KETUA Dekopinwil Sulteng, Dr. Abd. Malik Bram, S.H., M.H (tengah baju hitam) didampingi Dewan Pakar Dekopinwil Sulteng, Prof H Sulaiman Mamar (kiri), Wakil Ketua Dekopinwil Sulteng, Rudi Zulkarnain, Ketua Dekopinda Kota Palu, H Amin Badawi dan Ketua Dekopinda Sigi, Sri Ramlah SPd, dalam rapat koordinasi refleksi akhir tahun di salah satu kafe di Kota Palu, Rabu (31/12/2025) sore. FOTO: DAYAT

SULTENG RAYA - Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Sulawesi Tengah (Dekopinwil Sulteng) menggelar rapat koordinasi akhir tahun bersama pengurus, dewan pakar serta sejumlah Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) di Sulteng pada Rabu (31/12/2025) sore di salah satu kafe di Kota Palu.

Ketua Dekopinwil Sulteng, Dr. Abd. Malik Bram, S.H., M.H yang memimpin rapat koordinasi dalam refleksi akhir tahun 2025 menegaskan, tahun 2026 harus menjadi titik awal penerapan otonomi dan kemandirian koperasi, sesuai dengan prinsip dasar perkoperasian dan arahan Gubernur Sulawesi Tengah pada peringatan Hari Koperasi Nasional beberapa waktu lalu.

“Selama ini koperasi terlalu lama bergantung pada pembinaan pemerintah. Dibina terus tapi tidak mandiri, itu bukan kemajuan. Jus-

tru membuat koperasi tidak kreatif dan tidak berdaya saing,” kata Dr. Abd. Malik Bram didampingi Dewan Pakar Dekopinwil Sulteng, Prof H Sulaiman Mamar, Wakil Ketua Dekopinwil Sulteng, Rudi Zulkarnain, Ketua Dekopinda Kota Palu, H Amin Badawi, Ketua Dekopinda Donggala, Drs Anwar Sado, Ketua Dekopinda Sigi, Sri Ramlah SPd, Ketua Dekopinda Tolitoli, Yamin Tinago serta Ketua Dekopinda Touna, Samsir.

Selain itu, Malik Bram juga menyampaikan, hendaknya koperasi yang sudah mandiri agar didata kem-

bali, karena perkembangan dan dinamika perkoperasian di Sulteng belum mengembirakan akibat dampak bencana gempa dan tsunami pada tahun 2018, yang membuat infrastruktur koperasi anjlok.

Malik menyebutkan, setelah melalui kajian-kajian yang dilakukan Majelis Pakar Dekopinwil mengenai keberadan koperasi bahwa koperasi di Sulteng berjumlah sebanyak 2.600, dan sekarang sisa 2.200 koperasi, serta yang aktif sekitar 50 persen. Kemudian yang aktif kembali belum didata, karena Dekopin lembaga non-pemerintah.

“Di tahun 2026 kita berharap Dekopin harus jalan dan bergerak, tidak boleh diam dan harus aktif, sehingga kemandirian koperasi itu bisa tercapai,” ucap Malik yang juga mantan Hakim Adhoc PHI pada Pengadilan Negeri Palu.

Malik menegaskan, di tahun 2026 koperasi desa (Kopdes) yang berada di

masing-masing kelurahan dan desa adalah wadah masyarakat untuk menuju kedaulatan dan kemandirian koperasi, sehingga tidak boleh di bawah ketiak pemerintah secara terus menerus yang membebani anggaran negara.

“Karena kita masih di bawah ketiak pemerintah, tidak menjadi sukses tapi jadi binasa, bagaikan anak yang sudah dewasa bahkan sudah kawin tapi masih di bawah pemerintah yang dapat menumpulkan daya kreatifitas anak, sehingga harus hidup mandiri dan menata kehidupan sendiri tanpa ketergantungan dari pihak lain,” tegasnya.

Lanjutnya, berbeda dengan Kopdes merah putih yang memang harus dibina oleh pemerintah, jadi Dekopin tidak boleh lagi dibina oleh pemerintah. “Semua adalah tindakan yang harus di buang jauh-jauh dan harus berani berdiri di atas kaki sendiri, demi tujuan kemandirian untuk men-

sejahterakan anggota dan masyarakat, meningkatkan daya saing dan keadilan sosial, dan juga sebagai tulang punggung ekonomi sosial,” jelasnya.

Malik menilai, usai dilantik Presiden Prabowo telah membawa angin segar bagi perkoperasian, asalkan melakukan terobosan-terobosan yang baru. “Dekopin tidak mengharapkan apa-apa dari pemerintah, Dekopin bisa menggali sumber dana dari anggota sendiri,” ucapnya.

Sementara, Malik menyebutkan ada tujuh prinsip koperasi diantaranya, sistem keanggotaan koperasi sukarela dan terbuka, pemelihan secara demokrasi, partisipasi ekonomi anggota, ekonomi dan kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerjasama antar koperasi dan kepedulian terhadap imunitas masyarakat.

“Yang penting ini juga, ini sebuah keadaan yang sangat perlu disampaikan kepada publik adanya organisasi yang menyerupai Dekopin yang muncul di Sulteng, ini merupakan perampasan hak. Dekopin di bawah Jimly sudah dibawa ke ranah politik, sehingga Dekopin saat ini tertatih-tatih,” jelas Malik.

Oleh karena itu, Malik Bram mengharapkan, semoga di tahun 2026 ini kita kembali meningkatkan otonomi dan kemandirian koperasi. “Semoga di 2026 kita bisa memajukan koperasi, serta tetap Dekopinwil Sulteng diberi amanah oleh Gubernur Sulteng untuk membina 1.940 koperasi di Sulteng, kami sudah turun ke kabupaten menemui beberapa koperasi karena kami ini pengurus atau relawan koperasi yang mandiri.”

Ikut Musnahkan Sabu 60 Kg, DPD GRANAT Sulteng Apresiasi Polda Berantas Narkoba



KETUA DPD GRANAT Sulteng, Muhammad Nurul Haq saat ikut memusnahkan sabu di Mapolda Sulteng, Selasa (30/12/2025). FOTO: DOK DPD GRANAT SULTENG

SULTENG RAYA - DPD GRANAT Sulteng mengapresiasi Polda Sulteng dalam pemberantasan narkotika melalui pemusnahan barang bukti sabu sebanyak 60 Kg.

Melalui giat rilis akhir tahun pada Selasa (30/12/2025), Polda Sulawesi Tengah melaksanakan pemusnahan barang bukti 60 kg narkotika jenis sabu yang merupakan hasil dari pengungkapan jaringan peredaran gelap internasional asal Malaysia. Hal ini tentunya menjadi pengingat serius bagi para bandar bahwa Sulawesi Tengah bukanlah pasar dari barang

haram tersebut.

Pemusnahan barang bukti jenis sabu yang disaksikan oleh instansi terkait sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Polda dalam melindungi masyarakat Sulteng dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Ketua DPD GRANAT Sulteng, Muhammad Nurul Haq menyampaikan bahwa pemusnahan ini bukanlah sekedar rutinitas penegakan hukum, lebih dari itu, kegiatan ini merupakan pengejawantahan atas Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sekaligus mewujudkan Asta Cita yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Momentum ini menjadi spirit bagi kami organisasi pegiat anti narkotika untuk terus melakukan edukasi terhadap generasi muda sampai ke tingkat desa lewat DPC tingkat kabupaten/kota.

Menurutnya, dalam kajian kami bahwa modus operandi penyebaran narkoba di Sulawesi Tengah sangatlah beragam salah satunya dalam memanfaatkan media sosial dan aplikasi pesan sehingga sulit mendeteksi karena tidak melakukan transaksi langsung.

Nurul Haq menyampaikan bahwa data pengguna narkoba di Sulawesi rata-rata pada usia produktif yakni 20-40 tahun. “Jika ini tidak dilakukan pencegahan dini maka tingkat kriminalitas dan lingkaran kemiskinan makin meningkat. Kedepan Polda, BNN dan Beacukai memiliki peran yang sangat krusial dalam pemberantasan narkoba, bukan hanya sekedar tugas semata tetapi merupakan misi untuk melindungi generasi muda dan menjaga keamanan nasional,” tegasnya.

BANGUN SINERGI KAMTIBMAS

Satgas Madago Raya Ajak Tokoh Masyarakat Tolak Radikalisme di Parmout



PERSONEL Satgas II Preemtif Ops Madago Raya saat menyambangi Helmi Abdun, tokoh masyarakat Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi pada Sabtu (27/12/2025). FOTO: SATGAS MADAGO RAYA

SULTENG RAYA - Upaya pencegahan penyebaran radikalisme dan intoleran terus dilakukan Satgas II Preemtif Ops Madago Raya melalui pendekatan humanis. Salah satunya diwujudkan dengan kegiatan sambang dan silaturahmi kepada tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), Sabtu (27/12/2025).

Personel Satgas II Preemtif Ops Madago Raya menyambangi Helmi Abdun, tokoh masyarakat Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi preemtif dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Sambang dan silaturahmi tersebut, dilaksanakan oleh Kasat Binmas yang tergabung dalam Satgas II Preemtif Ops Madago Raya, AKP Zulkufan, bersama Aiptu Arwin Abubakar selaku personel Satgas Binmas. Keduanya berdialog langsung dengan tokoh masyarakat setempat.

Dalam pertemuan itu, AKP Zulkufan menyampaikan pentingnya membangun sinergitas antara kepolisian dan para tokoh masyarakat, sebagai garda terdepan dalam menangkap masuk dan berkembangnya

paham radikal dan intoleran.

AKP Zulkufan juga mengajak tokoh masyarakat untuk berperan aktif menjaga kondusivitas wilayah dengan meningkatkan kewaspadaan serta mempererat persatuan di tengah masyarakat Kelurahan Loji.

Menurut AKP Zulkufan, peran tokoh masyarakat dinilai sangat strategis dalam menciptakan suasana aman dan damai, sekaligus menjadi contoh positif bagi generasi muda agar tidak mudah terpengaruh paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan.

Sementara, Helmi Abdun mengapresiasi kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan Satgas II Preemtif Ops Madago Raya. Ia menilai pendekatan dialogis menjadi langkah yang tepat dalam membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan.

Helmi Abdun juga menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Ops Madago Raya, serta bekerja sama dengan aparat keamanan dalam upaya pencegahan radikalisme dan intoleran di Kabupaten Parigi Moutong.

Wakapolda Sulteng dan Danrem Cek Pospam di Kota Palu

SULTENG RAYA - Wakapolda Sulawesi Tengah (Sulteng), Brigjen Pol Dr. Helmi Kwartu Kusuma Putra Rauf bersama Forkopimda melakukan pemantauan langsung pengamanan malam pergantian Tahun Baru 2026 di sejumlah wilayah di Kota Palu, Rabu (31/12/2025) malam.

Kegiatan Patroli dan pemantauan tersebut, menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Patroli pengecekan dan pemantauan Pos Pengamanan (Pospam) tersebut, dipimpin Wakapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Dr. Helmi Kwartu Kusuma Putra Rauf didampingi Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Deni Gunawan, Kapolreta Palu, Basarnas dan PJU Polda Sulteng dengan mengunjungi Pospam Mambo, Pospam Martadinata dan Pospam PGM Ponegoro.

Dalam kunjungannya, Wakapolda meninjau Pos Pengamanan Mambo yang berada di Jalan Trans Sulawesi Km. 13, Kecamatan Palu Utara, Pospam Jalan R.E. Martadinata di Kecamatan Mantikulore, serta Pospam Diponegoro yang terletak tepat di depan Palu Grand Mall, Kecamatan Palu Barat.

Pemantauan dilakukan bersama stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.

Di setiap pos yang dikunjungi, Wakapolda menyempatkan diri menyapa dan berdialog langsung dengan personel yang tengah bertugas. Ia memberikan semangat dan motivasi kepada petugas gabungan agar tetap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, menjaga kesehatan, serta selalu mengedepankan sikap humanis dalam melayani masyarakat.

Wakapolda berpesan agar seluruh personel senantiasa waspada dan tidak membiarkan adanya potensi



WAKAPOLDA Sulteng, Brigjen Pol Dr. Helmi Kwartu Kusuma Putra Rauf bersama Forkopimda saat berdialog bersama personel gabungan di Pospam Kota Palu, Rabu (31/12/2025) malam. FOTO: BIDHUMAS POLDA SULTENG

gangguan yang dapat menghambat aktivitas masyarakat, khususnya di malam pergantian tahun.

Menurutnya, pengamanan bukan sekadar soal ketertiban, tetapi juga tentang menghadirkan rasa aman, ketenangan, dan kepercayaan di tengah masyarakat.

“Kehadiran kita di lapangan harus memberi rasa nyaman. Layanan masyarakat dengan hati, tetap santun, dan jaga kesehatan agar tugas pengabdian ini dapat berjalan maksimal,” pesan Wakapolda kepada para personel.

Melalui pemantauan ter-

sebut, diharapkan seluruh rangkaian pengamanan malam Tahun Baru di Kota Palu dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh kedamaian, seiring semangat kebersamaan antara aparat dan masyarakat dalam menyambut tahun yang baru dengan harapan dan optimisme.



PLN Sambung Listrik Huntara dan Fasum di Aceh Tamiang

SULTENG RAYA - PT PLN (Persero) terus mendukung percepatan pembangunan Rumah Hunian Danantara (Huntara) di Aceh Tamiang melalui kesiapan infrastruktur dan penyambungan jaringan listrik seluruh unit yang telah terbangun.

Langkah ini merupakan bentuk komitmen kehadiran negara dalam mempercepat pemulihan pascabencana melalui penyediaan prasarana dasar bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengapresiasi progres pembangunan Huntara beserta infrastruktur pendukung yang sedang dikebut. Dirinya menilai sinergi lintas kementerian, Danantara Indonesia, dan Pemerintah Daerah (Pemda) mampu menghasilkan kemajuan signifikan dalam waktu singkat. Sebanyak 600 unit akan diserahkan kepada Pemda pada 8 Januari 2026, untuk selanjutnya diberikan kepada warga terdampak bencana.

"Danantara Indonesia membuktikan bahwa kita bisa membangun 600 hunian, semua pihak telah bekerja dengan gemilang, dengan cepat," ujar Presiden Prabowo.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa dalam kurun waktu tiga bulan ke depan,

pembangunan Huntara secara nasional ditargetkan mencapai 15.000 unit yang tersebar di 3 provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Target pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh Tamiang ditetapkan secara jelas sejak awal, dan capaian hingga 1 Januari 2026 menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak untuk menepatinya. BUMN bergerak cepat, bekerja di lapangan dalam kondisi yang tidak mudah, untuk memastikan masyarakat segera mendapatkan hunian yang layak," jelasnya.

Rosan juga menekankan bahwa pembangunan Huntara bagi warga terdampak bencana bukan sekadar solusi jangka pendek, namun merupakan tahapan pemulihan yang lebih besar di berbagai sektor.

"Huntara ini menjadi jembatan penting menuju fase hunian permanen dan pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, kualitas dan keberlanjutan tetap menjadi perhatian utama," tambahnya.

Huntara dibangun sesuai standar kelayakan hunian



PRESIDEN Republik Indonesia, Prabowo Subianto (kiri) menyapa dan bersalaman dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo (kedua dari kanan) setelah memimpin rapat terbatas terkait percepatan pemulihan pascabencana di kawasan Rumah Hunian Danantara (Huntara), Kamis (1/1/2026). FOTO: BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

darurat, tidak hanya fokus terhadap konstruksi bangunan saja, melainkan juga kebutuhan dasar seperti listrik.

Ketersediaan listrik juga menjadi prioritas Pemerintah melalui Danantara Indonesia dalam membangun Huntara, selain akses air bersih, sanitasi memadai, serta dukungan layanan kesehatan di lokasi.

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan PLN dalam mendukung penuh pembangunan Huntara melalui penyediaan listrik yang aman dan andal untuk seluruh unit hunian.

"PLN siap melaksanakan arahan Pemerintah melalui Danantara Indonesia untuk memastikan kesiapan

infrastruktur kelistrikan Huntara. Setiap unit hunian yang telah selesai dibangun, kami pastikan listriknya juga sudah tersedia dan dapat langsung menyala, sehingga masyarakat bisa segera menempati tempat tinggalnya dengan aman dan nyaman," kata Darmawan.

Saat ini, PLN telah menyiapkan infrastruktur kelistrikan di kawasan Huntara Aceh Tamiang, seperti pembangunan trafo, jaringan listrik, dan kWh meter seluruh hunian yang telah terbangun. Bahkan jaringan listrik telah tersambung se-

penuhnya dan cukup untuk melayani kebutuhan listrik hunian maupun fasilitas umum.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria didampingi Darmawan turun langsung mengawal proses pembangunan Huntara Aceh Tamiang dan infrastruktur kelistrikannya. Darmawan menegaskan, kehadiran listrik yang andal di Huntara merupakan salah satu kebutuhan dasar yang wajib tersedia untuk menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.

"Kami memahami bahwa

saudara-saudara kita yang terdampak banjir bandang dan longsor telah kehilangan banyak hal, bukan hanya rumah, namun juga rasa aman dan kenyamanan. Karena itu, PLN berupaya menghadirkan listrik yang prima di kawasan Huntara. Sehingga, masyarakat dapat segera tinggal, anak-anak bisa kembali belajar dengan nyaman, dan keluarga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih layak. Ini adalah komitmen kami untuk terus mendampingi masyarakat bangkit dari bencana," jelas Darmawan./h

HAPUS TRAUMA PASCABENCANA

BMH Hadirkan Indonesia Bercerita di Aceh Tamiang



LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah (BMH) menggelar program "Indonesia Bercerita" di Desa Karya, Kampung Seumadam, Kecamatan Kejuruhan Muda, Aceh Tamiang. FOTO: LAZNAS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH)

SULTENG RAYA - Pemulihan pascabencana tidak hanya menyisakan pekerjaan membangun kembali rumah dan fasilitas umum. Di balik itu, ada luka tak kasatmata berupa trauma, kecemasan, dan rasa takut yang masih membekas, terutama pada anak-anak penyintas.

Kesadaran inilah yang mendorong Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) menggelar program "Indonesia Bercerita" di Desa Karya, Kampung Seumadam, Kecamatan Kejuruhan

Muda, Aceh Tamiang. Program ini menjadi bagian dari ikhtiar pemulihan psikososial warga agar mampu bangkit dan menata kembali kehidupan pascabencana.

Koordinator Lapangan BMH di lokasi, Rohsyandi Santika mengatakan, program ini merupakan bagian dari pendampingan berkelanjutan sejak masa tanggap darurat.

"Kami ingin psikologis warga, terutama anak-anak, kembali pulih. Program ini adalah ikhtiar kita bersama agar mereka siap bangkit

dan menatap masa depan dengan lebih optimis pasca-bencana," ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (2/1/2026).

Suasana hangat dan penuh keceriaan tercipta saat Kak Imam membacakan kisah heroik Nabi Ibrahim AS dalam melawan kezaliman Raja Namrud. Melalui tuturan yang ringan dan inspiratif, anak-anak diajak memahami nilai kecerdasan, keberanian, dan kekuatan kebenaran dalam menghadapi ketakutan.

Keceriaan semakin leng-

kap ketika Kak Ubay mengajak anak-anak mengikuti kuis edukatif yang diselengi sulap tradisional. Tawa pun pecah, menghadirkan ruang aman dan menyenangkan bagi anak-anak untuk kembali mengekspresikan diri.

Warga pun sangat antusias. Tidak hanya anak-anak, para orang tua pun turut larut dalam suasana yang kondusif dan penuh kehangatan. Kehadiran tim BMH seolah menjadi penawar duka bagi warga yang masih berjuang memulihkan diri.rpb

KLH Ingatkan Pemkot Tangsel untuk Kelola Sampah Mandiri

SULTENG RAYA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengingatkan pengelola kawasan di Tangerang Selatan (Tangsel) agar mengelola sampah sendiri. Upaya itu guna mengurangi beban sampah yang harus dikelola pemerintah daerah. "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa setiap pengelola kawasan dilarang keras lepas tangan dan menyerahkan beban sampah sepenuhnya kepada pemda," kata Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Agus Rusly, dalam pernyataan, Jumat (2/1/2026). Dia mengingatkan bahwa strategi pengendalian harus dimulai dari akarnya. Yakni melalui pengaturan sistem pengadaan barang yang minim limbah hingga penyiapan proses bisnis kawasan yang mendukung ekonomi sirkular.

Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi Kepmen LH/Kepala BPLH Nomor 2648 Tahun 2025 sebagai senjata baru dalam merevolusi tata kelola sampah di kawasan komersial hingga industri pada di Tangerang Selatan, Senin (29/12/2025).

Dia menyebut bahwa aturan itu bukan sekadar urusan administratif, melainkan sebuah perubahan paradigma di mana pengelolaan sampah di mal, apartemen, pasar, hingga kawasan industri kini



PETUGAS kebersihan membersihkan sampah yang berserakan di jalan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (16/12/2025). FOTO: EDWIN PUTRANTO/REP

menjadi kewajiban hukum mutlak bagi pengelola. Adanya aturan itu memastikan bahwa pengelolaan sampah bukan lagi tanggung jawab penuh pemerintah daerah.

Daerah Tangerang Selatan sendiri tengah menghadapi krisis sampah dengan volume yang mencapai 1.200 ton per hari dan kondisi Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Cipeucang yang telah ditutup. Sekretaris Daerah Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo dalam forum yang dihadiri oleh 79 perwakilan pengelola mal, plaza, hingga asosiasi apartemen tersebut juga menyatakan kewajiban tersebut perlu dipatuhi oleh para pengelola kawasan. "Hambatan di hilir ini telah berdampak langsung pada estetika dan kesehatan ling-

kungan di berbagai sudut kota, sehingga intervensi di tingkat sumber (hulu) menjadi jadi harga mati yang tidak bisa ditawar," jelas Bambang Noertjahjo.rpb

BPKB HILANG	
NOPOL	: DN 2321 NH
NAMA	: RATHI SARDINA
ALAMAT	: JL. SUNGAI MIU NO. 8 A PALU BARAT
MERK/TYPE	: YAMAHA 2 BJ
NO RANGKA	: MH32BJ001EJ343177
NO MESIN	: 2BJ-343289
NO BPKB	: K10964209S1

BPKB HILANG	
Nama	: ESKI TOBONDO
Nomor Polisi	: DN 1684 NX
Merek/Type	: MITSUBISHI Pajero SPORT 2.4L DAKAR (4X2) 8AT
Nomor Rangka	: MMBGUKR10HH015537
Nomor Mesin	: 4N1SUBM1879
Nomor BPKB	: M0220352351

Biro Perjalanan Umum

CV. MITRATOUNA TRAVEL/BIS

PALU-AMPANA

AGEN PERWAKILAN :

PALU : Jl. Tombolotutu No.50-52
Telp : (0451) 424347 - 4704707 - 427139

AMPANA : Jl. Tanjumbulu Bawah No. 9
(Dekat Tugu Ampana)
Telp : 081252984112, 081252984116
081243799363, 082122150777

BIRO PERJALANAN UMUM

PRIMA JAYA TRAVEL

PALU - POSO - TENTENA

BUNGKU - KENDARI

PALU
Jl. Hangtua No. 40
Telp.: 082396825339

BUNGKU (MOROWALI)
Jl. Trans Sulawesi
(Depan RSUD Morowali)
Telp : 085394579024

KENDARI
Terminal Puwahu
Telp : 082342677110

LORENNNA

Untuk yang berkeinginan rental MOBIL LORENNNA akan mendapatkan FREE MINERAL WATER & SNACK
7x Kebersihan
Pala-Tula gratis 1 tiket

Toko Sempurna Baru
Jl. Syarif Maresur No.111
Telaboli
Telp/WA: 0812 3333 2318
Cabang Palu:
Jl. Juanda No. 78
Telp: 0813 4124 2003
WA : 0862 3256 2003

Kepuasan & Kenyamanan Anda Prioritas Utama Kami

Pilih yang Perlu, Bijak dalam Konsumsi

KATA “konsumsi” berasal dari bahasa Latin *consumere* yang berarti “menggunakan habis” atau “memakai.” Dalam konteks ekonomi dan sosial, konsumsi adalah aktivitas manusia dalam menggunakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup — mulai dari makan, berpakaian, hingga kebutuhan rekreasi dan teknologi. Konsumsi mencerminkan cara seseorang berinteraksi dengan lingkungannya, menilai nilai suatu benda, serta mengekspresikan identitas diri.

OLEH : DEBY SUNARIS MTh., M.M., CHCP

NAMUN, di era modern yang sangat dipengaruhi oleh globalisasi dan digitalisasi, konsumsi bukan lagi sekadar kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar. Ia telah berubah menjadi gaya hidup. Teknologi, media sosial, dan sistem ekonomi kapitalistik telah menciptakan budaya konsumtif yang menekankan pada kepemilikan dan penampilan ketimbang kebutuhan. Fenomena seperti pembelian impulsif, *fast fashion*, dan siklus tren yang cepat mendorong banyak orang untuk membeli bukan karena perlu, melainkan karena ingin diakui atau mengikuti arus.

Dalam konteks ini, muncul kebutuhan akan sikap bijaksana dalam konsumsi. Sikap tersebut bukanlah menolak konsumsi sama sekali, tetapi memahami mana yang benar-benar diperlukan, membedakan keinginan dari kebutuhan, dan menggunakan sumber daya dengan tanggung jawab moral, sosial, dan ekologis. Bijak dalam konsumsi menjadi upaya untuk menata hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan agar selaras dan berkelanjutan.

POLA KONSUMSI ORANG MODERN

Pola konsumsi masyarakat modern ditandai oleh tiga kecenderungan besar:

1. Individualisme dan gaya hidup konsumtif.
- Masyarakat modern cenderung menilai dirinya dari apa yang dimiliki, bukan dari siapa dirinya. Barang dan merek menjadi simbol status sosial. Hal ini didorong oleh sistem ekonomi yang menekankan citra diri melalui konsumsi.
2. Kemudahan akses dan percepatan teknologi.
- Digitalisasi membuat konsumsi semakin instan. Dengan satu klik, seseorang dapat membeli produk dari belahan dunia lain. Fenomena online shopping mengubah cara kita mengelola kebutuhan dan keuangan — sering kali tanpa kontrol yang matang.
3. Komodifikasi waktu dan pengalaman.
- Tidak hanya benda, tetapi juga waktu luang dan pengalaman hidup telah menjadi bagian dari konsumsi. Liburan, kuliner, dan hobi sering diukur dari seberapa eksklusif dan menariknya untuk ditampilkan di media sosial.

Dalam konteks ini, manusia berisiko kehilangan makna dari aktivitas konsumsi itu sendiri. Konsumsi berubah dari alat pemenuhan kebutuhan menjadi tujuan hidup yang menguras energi, waktu, dan sumber daya alam. Padahal, konsumsi yang berlebihan bukan hanya berdampak pada individu (seperti stres finansial atau kehilangan makna hidup), tetapi juga pada lingkungan dan tatanan sosial.

Oleh karena itu, muncul urgensi untuk mengembangkan kesadaran baru: konsum-

si harus dikaitkan dengan nilai, bukan hanya dengan kuantitas. Konsumsi harus diarahkan pada kebaikan bersama, bukan hanya kepuasan pribadi.

PENTINGNYA SIKAP BIJAKSANA DALAM KONSUMSI

Sikap bijaksana dalam konsumsi lahir dari pengenalan akan tiga prinsip dasar:

1. Membedakan kebutuhan dan keinginan.
- Kebutuhan adalah sesuatu yang esensial bagi kehidupan (seperti makan, tempat tinggal, dan kesehatan). Keinginan bersifat tambahan — ia memperkaya hidup tetapi tidak mutlak perlu. Orang bijak dapat menunda pemenuhan keinginan ketika sumber daya terbatas.
2. Menimbang nilai moral dan sosial dari konsumsi.
- Setiap keputusan membeli mencerminkan nilai yang kita anut. Memilih produk lokal, ramah lingkungan, atau hasil karya yang adil adalah bentuk konsumsi yang beretika.
3. Kerelaan untuk berbagi dan bersyukur.
- Konsumsi bijak tidak memisahkan diri dari nilai spiritual. Ia mengandung rasa cukup (*contentment*) dan bersedia berbagi dengan yang membutuhkan. Dalam banyak ajaran agama, termasuk Kristen, konsumsi tidak boleh menjadi pusat hidup.

Sikap ini selaras dengan konsep tanggung jawab sebagai *stewardship* atau penatalayanan, yakni memanfaatkan anugerah Tuhan secara bijak untuk kemaslahatan bersama. Konsumsi yang bijak tidak menolak kemajuan, tetapi mengelolanya dengan hati yang ditata, bukan dengan dorongan yang tak terkontrol.

PANDANGAN SAHLINS (2000) TENTANG KONSUMSI DALAM CULTURE IN PRACTICE: SELECTED ESSAYS

Pierre Sahlins (2000) melalui *Culture in Practice: Selected Essays*, menegaskan bahwa konsumsi tidak semata-mata aktivitas ekonomi, melainkan tindakan budaya. Menurutnya, cara seseorang mengonsumsi mencerminkan nilai, identitas, dan simbol sosial. Konsumsi adalah sarana manusia untuk berpartisipasi dalam makna budaya, bukan sekadar memperoleh kepuasan material.

Sahlins menjelaskan bahwa konsumsi modern mengalami transformasi menjadi bentuk komunikasi sosial. Seseorang membeli dan menggunakan suatu produk bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga untuk menandakan status, afiliasi, atau selera tertentu. Barang menjadi tanda (*sign*), dan manusia belajar “membaca” tanda-tanda itu dalam interaksi sosial. Dalam masyarakat kapitalis, makna budaya sering kali digantikan oleh simbol-simbol konsumsi. Akibatnya, nilai spiritual, etis, dan sosial tergeser oleh nilai komersial.



Ia juga menyoroti paradoks konsumsi modern: semakin banyak yang dimiliki seseorang, semakin besar pula perasaan kekurangannya. Hal ini karena sistem konsumsi berada dalam siklus yang tidak pernah selesai — selalu muncul keinginan baru untuk menggantikan yang lama. Dalam pandangan Salins, masyarakat modern menghadapi bahaya “*disenchantment*,” yaitu hilangnya makna dan nilai mendalam dalam kehidupan sehari-hari akibat dominasi nilai materialistik.

RELEVANSI PANDANGAN SALIHINS DALAM KONTEKS POLA KONSUMSI MODERN

Pandangan Sahlins (2000) sangat relevan untuk merenungi fenomena konsumsi di zaman modern. Konsumsi telah menjadi cara manusia membentuk identitas, tetapi kehilangan kedalaman makna. Orang hidup di bawah tekanan untuk tampil, bukan untuk menjadi. Dalam kondisi ini, kritik Sahlins membantu kita menyadari bahwa konsumsi bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga spiritualitas dan kemanusiaan.

Sahlins mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam budaya konsumtif yang dangkal. Ia mendorong terbentuknya kesadaran kultural yang membawa manusia kembali pada nilai-nilai kesederhanaan, kesyukuran, dan penghargaan terhadap makna sejati. Dalam era digital ini, di mana promosi dan iklan menguasai ruang privat manusia, refleksi terhadap makna konsumsi sangatlah penting untuk menjaga integritas budaya dan kemanusiaan.

RELEVANSI POLA KONSUMSI MODERN MENURUT SAHLINS (2000) DALAM PENDIDIKAN KRISTEN

Pendidikan Kristen memiliki misi membentuk karakter berdasarkan nilai-nilai Injili, salah satunya adalah hikmat dalam menggunakan sumber daya. Dalam konteks ini, pemikiran Sahlins sangat beresonansi dengan panggilan iman Kristen: konsumsi bukan sekadar tindakan ekonomi, tetapi bagian dari tanggung jawab spiritual terhadap ciptaan Tuhan.

Beberapa relevansi penting antara pandangan Salins dan pendidikan Kristen meliputi:

1. Pemulihan makna spiritual dalam konsumsi.
- Pendidikan Kristen mengajarkan bahwa segala se-

suatu berasal dari Tuhan dan harus digunakan untuk kemuliaan-Nya. Konsumsi yang bijak berarti mengakui bahwa harta benda hanyalah sarana, bukan tujuan. Ini sejalan dengan gagasan Sahlins bahwa konsumsi hendaknya memiliki dimensi makna dan tidak berhenti pada simbol.

2. Pembentukan karakter dan disiplin diri.
- Salah satu misi utama pendidikan Kristen ialah membangun integritas dan pengendalian diri. Pola konsumsi modern yang serba cepat mudah mengikis kemampuan menunda kesenangan (*delay gratification*). Sahlins mengingatkan perlunya kesadaran reflektif dalam konsumsi — suatu hal yang juga menjadi inti dari pembinaan karakter Kristen.
3. Keadilan sosial dan solidaritas.
- Ajaran Kristen menekankan pentingnya kasih kepada sesama dan keadilan sosial. Sikap konsumtif yang berlebihan sering kali berkontribusi terhadap eksploitasi sumber daya dan ketimpangan ekonomi. Pendidikan Kristen harus menanamkan kesadaran bahwa konsumsi adalah tindakan etis yang berdampak pada kehidupan orang lain.

4. Ekoteologi dan tanggung jawab terhadap ciptaan.

Konsumsi yang tidak terkendali mempercepat krisis lingkungan. Pandangan Sahlins menyoroti aspek budaya dan ekologis konsumsi, yang sejalan dengan ajaran Kristen tentang *stewardship* — memelihara bumi sebagai titipan Allah, bukan mengeksploitasinya untuk keserakahan manusia.

Dengan demikian, pendidikan Kristen berperan penting dalam mengembalikan makna konsumsi ke dalam kerangka nilai: kasih, kesederhanaan, dan tanggung jawab.

KONSUMSI BIJAK SEBAGAI PENDIDIKAN MORAL DAN SPIRITUAL

Jika konsumsi adalah cerminan nilai budaya, maka pendidikan Kristen harus membantu generasi muda untuk mengenali dan mengelola nilai-nilai tersebut. Mengajarkan literasi keuangan saja tidak cukup. Diperlukan pendidikan moral dan spiritual agar siswa di sekolah memahami bahwa setiap pilihan konsumsi adalah keputusan etis.

Guru dan lembaga pendidikan dapat menanamkan kebijaksanaan konsumsi melalui:

- Pembelajaran kontekstual: mengaitkan isu konsumsi modern dengan ajaran Alkitab, misalnya melalui prinsip kesederhanaan dan tanggung jawab.
- Keteladanan hidup: guru dan orang dewasa menunjukkan gaya hidup yang tidak be-

rorientasi pada kemewahan, tetapi pada makna dan fungsi.

- Proyek sosial: melibatkan siswa dalam kegiatan berbagi atau mengelola sumber daya bersama untuk menumbuhkan empati terhadap sesama.
- Dengan langkah-langkah ini, pendidikan Kristen dapat menjadi benteng moral di tengah budaya konsumtif yang didorong oleh arus iklan dan media.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pandangan Sahlins (2000) dalam *Culture in Practice: Selected Essays* memberi wawasan tentang konsumsi sebagai praktik budaya yang mencerminkan nilai dan identitas manusia. Dalam masyarakat modern, konsumsi telah bergeser dari alat pemenuhan kebutuhan menjadi simbol prestise dan status sosial. Akibatnya, muncul tantangan baru berupa krisis makna, ketidakadilan sosial, dan degradasi lingkungan. Pendidikan Kristen merespons dengan doktrin *stewardship*, mengajak umat mengelola ciptaan sebagai panggilan ilahi (Kej. 2:15). Sikap bijaksana dalam konsumsi menjadi kunci untuk keluar dari lingkaran konsumtif ini. Konsumsi bijak adalah bentuk kesadaran diri — bahwa setiap tindakan membeli, menggunakan, atau memanfaatkan sesuatu memiliki dimensi spiritual dan sosial. Dalam pendidikan Kristen, prinsip ini berarti menempatkan konsumsi dalam kerangka tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama, melalui pengajaran yang membentuk karakter hemat, berbagi, dan peduli ekologi.

REKOMENDASI:

1. Individu: biasakan refleksi diri sebelum membeli dan latih rasa cukup.
 2. Lembaga pendidikan: integrasikan etika konsumsi dalam kurikulum karakter dan iman.
 3. Masyarakat dan gereja: dorong gaya hidup sederhana dan berkeadilan sosial.
 4. Pemerintah: kembangkan kebijakan konsumsi berkelanjutan dan pendidikan etis publik.
- Menjadi bijak dalam konsumsi berarti memilih dengan hati nurani dan hikmat iman: memilih yang perlu, bukan yang semata diinginkan — demi keseimbangan hidup, keadilan sosial, pelestarian ciptaan Tuhan, pengurangan limbah berlebih, serta kemuliaan Sang Pemberi segala sesuatu melalui *stewardship* yang bertanggung jawab atas berkat-berkat-Nya. Solideo Gloria. (*Kajian buku “Culture in Practice Selected Essay by Sahlins, 2000. Artikel Antropologi & PAK Kebudayaan Program Pasca Sarjana IAKN Manado 2025 – Deby Sunaris*)

TAJUK

Memaknai Ulang Pertumbuhan

MESKI baru memasuki hari kedua 2026, mesin negara sudah dipacu untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,4%. Angka itu disepakati pemerintah dan DPR serta telah disahkan dalam APBN 2026. Namun, harus diakui, target tersebut tergolong ambisius, bahkan sekitar 0,5% lebih tinggi daripada proyeksi banyak ekonom.

Persoalannya bukan semata soal kecepatan mengejar target. Di tengah krisis ekologis yang kian nyata sejak akhir 2025, yang ditandai kembali oleh banjir bandang pada malam pergantian tahun, yang jauh lebih mendasak ialah bagaimana pemerintah memaknai ulang arti pertumbuhan itu sendiri, termasuk cara mencapainya. Pertumbuhan yang dikejar tanpa koreksi justru berpotensi menumpuk risiko baru.

Berbagai kajian dan fakta lapangan dari Aceh, Sumatra, hingga Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa cuaca ekstrem hanyalah pemicu. Petaka sejatinya telah lama dipersiapkan melalui deforestasi masif, baik untuk perkebunan monokultur maupun pertambangan. Alih fungsi hutan dan pengabaian daya dukung lingkungan telah menciptakan bom waktu yang kini meledak satu per satu.

Memasuki 2026, belum tampak tanda-tanda bahwa bom waktu itu benar-benar dijinakkan. Justru langkah-langkah pemerintah dalam menggenjot sektor andalan pertumbuhan seperti energi, pertanian, dan manufaktur, masih menempatkan eksploitasi sumber daya alam sebagai tumpuan utama.

Dalam upaya mengejar swasembada pangan, misalnya, perluasan areal sawit kembali dijadikan opsi di berbagai daerah. Pernyataan Presiden Prabowo tentang rencana perluasan sawit bahkan disampaikan di tengah kondisi Sumatra yang masih porak-poranda akibat bencana. Lebih jauh, pada pertengahan Desember lalu, Presiden juga menyatakan akan memperluas perkebunan sawit di Papua. Padahal, sejak 2022, luasan sawit di Pulau Cenderawasih hampir menyentuh batas daya dukung lingkungannya, yakni 290.659 hektare dari ambang maksimal 290.837 hektare.

Dampak dari kebijakan semacam itu bukan sekadar risiko hipotetis. Banjir bandang di Sumatra telah menimbulkan kerugian hingga Rp68,67 triliun, setara 0,29% produk domestik bruto (PDB). Untuk pemulihan saja, negara harus menggelontorkan anggaran Rp51,82 triliun. Ironisnya, penerimaan negara dari sektor-sektor perusak lingkungan tersebut sama sekali tidak sebanding.


Perhitungan Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan betapa timpangnya neraca itu. Di Aceh, PNBP sektor tambang per 31 Agustus hanya Rp929 miliar, jauh di bawah kerugian bencana yang mencapai Rp2,04 triliun. Dana bagi hasil (DBH) perkebunan sawit Aceh pun hanya Rp12 miliar, sementara DBH mineral dan batu bara pada 2025 sebesar Rp56,3 miliar.

Angka-angka itu bahkan tidak mendekati biaya sosial, ekologis, dan fiskal yang harus ditanggung negara. Singkatnya, cara kerja sektor ekstraktif dan perkebunan saat ini lebih banyak membuat negara boncos ketimbang untung.

Dengan tren siklon tropis yang diperkirakan berlanjut sepanjang 2026, pemerintah tidak punya banyak pilihan selain benar-benar memaknai ulang target pertumbuhan. Bisnis seperti biasa (*business as usual*) sama artinya dengan mengundung petaka berulang.

Pemerintah tidak perlu ragu mengoreksi target pertumbuhan, dan koreksi itu tidak harus menunggu hingga tahun hampir berakhir. Lebih penting lagi, koreksi tersebut harus disertai perubahan indikator. Pertumbuhan tidak boleh terus diukur secara sempit melalui PDB, inflasi, dan indikator fiskal-moneter semata.

Daya dukung lingkungan mesti ditempatkan sebagai variabel kunci dalam perencanaan ekonomi nasional. Sebab, di sanalah sesungguhnya fondasi kehidupan rakyat bertumpu. Pertumbuhan yang merusak alam bukanlah kemajuan, melainkan jalan pintas menuju krisis yang lebih besar.**Media Indonesia*

 <p>PENERBIT: PT. Trimedia Sulteng Mandiri No. Rek. Bank Sulteng, An. PT. Trimedia Sulteng Mandiri Acc. 0010107770011, Rek.BSI No. 728273443 a.n. PT. Trimedia Sulteng Mandiri Rek. Bank Mandiri, No. 151-00-1205223-6 An. PT. TRIMEDIA SULTENG MANDIRI PERWAKILAN JAKARTA: Jl. Tebet Timur IV F No. 6 Jakarta Selatan (Ahmad Avenus Toana, Sudarsono, Syafii, Agung Ramadhan) PERCETAKAN: TRIMEDIA GROUP (Isi di luar tanggung jawab percetakan)</p>	<p>WARTAWAN HARIAN SULTENG RAYA, DIBEKALI KARTU PERS/SURAT TUGAS DAN NAMANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI</p>	<p>PENDIRI/PIMPINAN UMUM: Tri Putra Toana. DEWAN MANAJEMEN TRIMEDIA : Tri Putra Toana, Temu Sutrisno, Mahmud Matangara. PIMPINAN PERUSAHAAN: Suyanto. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Irwain.</p>
		<p>REDAKTUR: Amiluddin, Andi Nurhidayat, Rahmat Kurniawan. STAF REDAKSI: Irwan, Andi Nurhidayat, Amiluddin, Amar Sakti, Andi Besse Rahmat Kurniawan, Helmy Jatmika. SEKRETARIS REDAKSI: Jane Lestari Parabak</p> <p>LITBANG: A. Madukelleng, Fery, Hangga Nugracha. BIRO DONGGALA: Wahid Agus. BIRO SIGI: Feri Fadli. BIRO PARMOUT: Aslan Laeho. BIRO TOUNA: Budi. BIRO POSO: Syamsuyadi. BIRO BALUT: - BIRO MOROWALI: Intan. BIRO MOROWALI UTARA: Ivan Tagora. BIRO TOLITOLI: Rustam. BIRO BANGKEP: Pariaman Tambunan (Kepala Biro). BIRO BANGGAI: Pariaman T. E.</p> <p>DESIGN & ARTISTIK: Azwar Anas (Manajer), Feryanto, Wiwis. PEMASARAN/SIRKULASI: Narwanro, Zainuddin L, Eko Margianto. KEUANGAN: Febrianti. EMAIL: sultengraya7th@gmail.com, sultengraya@gmail.com TARIF IKLAN: Warna (FC) Rp. 45.000/mmk. Hitam Putih (BW) Rp.30.000/mmk. ALAMAT REDAKSI: Jl. Rusa No. 36 TLP: 0451 4012 445 ALAMAT PERCETAKAN: Jl. Rusa No.36 Palu.</p>

OJK Dorong Pasar Modal Berperan Strategis Dukung Agenda Prioritas Pemerintah



KETUA Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar saat menyampaikan sambutan pada Pembukaan Perdagangan Perdana Bursa Efek Indonesia Tahun 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (2/1/2025). **FOTO: DOK. OJK**

SULTENG RAYA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pasar modal Indonesia semakin berperan strategis dalam mendukung agenda prioritas pemerintah.

Dukungan itu melalui peningkatan integritas pasar, pendalaman likuiditas, penguatan basis investor institusi, serta percepatan pembangunan ekosistem bursa karbon yang kredibel dan berstandar internasional.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisiner

OJK, Mahendra Siregar dalam sambutannya pada Pembukaan Perdagangan Perdana Bursa Efek Indonesia Tahun 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (2/1/2025).

Mahendra juga mengatakan, OJK akan terus mendorong peningkatan perlindungan investor minoritas dan retail yang saat ini menopang IHSG di antaranya melalui penegakan aspek perilaku atau market conduct termasuk penguatan pengawasan perilaku influencer keuan-

gan atau finfluencer. OJK saat ini tengah menyiapkan aturan baru bagi influencer keuangan (finfluencer), yang dalam tahap finalisasi dan ditargetkan terbit pada pertengahan 2026, dengan penekanan pada kapabilitas, transparansi, dan kepatuhan perizinan, untuk mendukung literasi investasi yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut, Mahendra mendorong peningkatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait yang dapat memperbesar

peran Pasar Modal Indonesia sebagai sumber pendanaan utama bagi perusahaan emiten dan juga menjadikan sektor jasa keuangan sebagai motor pertumbuhan perekonomian yang kuat secara menyeluruh.

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga sinergitas dan kolaborasi di antara seluruh pemangku kepentingan. Sinergi dan kolaborasi Komite Kebijakan Sektor Keuangan KSSK tentu menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan peran sektor keuangan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional,” kata Mahendra.

Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman menjelaskan, BEI telah menyiapkan masterplan pengembangan pasar modal 2026-2030 untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan dan meningkatkan daya saing global.

Dalam peta jalan tersebut, BEI menetapkan tujuan besar pada 2030, yakni membangun pasar modal yang inovatif, transparan, inklusif, serta tumbuh secara global.

“Target ambisius ini didukung oleh penguatan infrastruktur pasar, peningkatan kualitas emiten dan investor, serta perluasan partisipasi publik,” kata Iman.

Iman menambahkan, BEI juga mendorong inovasi produk dan pendalaman pasar agar pasar modal tidak hanya tumbuh dari sisi nilai, tetapi juga berperan lebih besar dalam pembiayaan jangka panjang ekonomi nasional.

KINERJA PASAR MODAL INDONESIA

Selaras dengan momentum pemulihan dan ekspansi ekonomi nasional, Pasar Modal Indonesia menutup tahun 2025 dengan kinerja yang solid. IHSG berada pada level 8.646,94 poin, menguat 22,13 persen secara year to date (ytd) dan mencatatkan beberapa kali all time high sepanjang tahun 2025.

Setelah mengalami net sell di awal 2025, investor non-residen kembali mencatatkan net buy di Semester II-2025 sebesar Rp36,23 triliun, mencerminkan pulihnya kepercayaan terhadap prospek ekonomi nasional dan kinerja korporasi.

Dari sisi penghimpunan dana, hingga 31 Desember 2025 tercatat 215 Penawaran Umum dengan total nilai Rp275 triliun, termasuk 18 emiten baru dengan nilai IPO Rp14,41 triliun.

Rerata nilai transaksi harian juga meningkat menjadi Rp18,1 triliun, dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp12,9 triliun, seiring pertumbuhan

Single Investor Identification (SID) yang mencapai 20,2 juta SID atau meningkat 36 persen secara ytd, dengan dominasi investor berusia di bawah 40 tahun.

Meski demikian, OJK menilai masih terdapat ruang penguatan, terutama pada kinerja indeks LQ45 yang tumbuh 2,41 persen, serta kontribusi pasar saham terhadap PDB yang mencapai 72 persen, namun masih berada di bawah negara kawasan seperti India (140 persen), Thailand (101 persen), dan Malaysia (97 persen).

Selain itu, porsi transaksi investor ritel yang meningkat dari 38 persen di akhir 2024 menjadi 50 persen di 2025, mempertegas urgensi penguatan perlindungan investor dari praktik transaksi tidak wajar dan manipulasi pasar.

ARAH KEBIJAKAN PASAR MODAL INDONESIA 2026

Memasuki 2026, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) berkomitmen mengimplementasikan berbagai program strategis yang fokus pada peningkatan integritas dan kedalaman pasar.

Pertama, peningkatan kualitas perusahaan tercatat melalui penyempurnaan kebijakan secara menyeluruh dari entry requirement, peningkatan free float atau floating shares termasuk continuous free float, meningkatkan transparansi ultimate beneficial owner sampai exit policy yang jelas.

Mahendra mengatakan, peningkatan transparansi ultimate beneficial owner untuk perusahaan tercatat diperlukan untuk meminimalisasi transaksi efek yang tidak wajar dan meningkatkan likuiditas real di pasar sekaligus menjawab keraguan investor dan lembaga internasional.

Kedua, peningkatan basis investor baik domestik maupun asing. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan peran investor institusi terutama reksa dana, asuransi, dan dana pensiun, termasuk peningkatan basis investor baik domestik maupun asing.

Program ini dilaksanakan melalui peningkatan peran investor institusi terutama reksa dana, asuransi, dan dana pensiun yang dinilai semakin siap kembali memperbesar alokasi investasi di pasar modal secara sehat sesuai praktik manajemen risiko yang baik.

Ketiga, adopsi melaksanakan reformasi tata kelola pasar saham terkini antara lain melalui penguatan

aspek transparansi kualitas disclosure dan disiplin pengelolaan perusahaan yang mampu meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan pasar yang berkelanjutan.

Terakhir, penguatan manajemen risiko dan tata kelola teknologi informasi. OJK juga telah mengenakan berbagai langkah pengenaan sanksi dan hukuman di pasar modal antara lain denda kepada 121 pihak pencabutan izin, 6 pihak surat peringatan dan perintah tertulis termasuk keterlambatan terhadap 638 pelaku usaha.

Melengkapi inisiatif ini OJK bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan BEI membangun Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Perpres 110/2025), termasuk penyesuaian POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon (POJK 14/2023), guna menghadirkan sistem registri dan pencatatan unit karbon yang kredibel, transparan, dan interoperable dengan standar global, demi mendorong pendalaman pasar dan percepatan ekonomi hijau Indonesia.

OJK juga memastikan keberlanjutan perlakuan khusus bagi nasabah dan pemegang polis terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 10 Desember 2025, sebagai aktivasi cepat POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan (LJK) pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK 19/2022), mencakup restrukturisasi kredit yang tetap dikategorikan lancar, penilaian kualitas kredit berbasis ketepatan pembayaran, serta percepatan dan simplifikasi klaim di sektor perasuransian.

OJK menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi industri dalam mewujudkan Pasar Modal Indonesia yang likuid, efisien, transparan, berintegritas, dan berdaya saing global, sekaligus menjadi pilar pembiayaan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan ekonomi hijau nasional. OJK akan terus memantau dinamika global dan domestik, serta mengambil langkah yang diperlukan guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan industri pasar modal yang sehat dan berkelanjutan. **KH**

PEMULIHAN BENCANA SUMATRA

BRI Dukung Pembangunan Rumah Hunian Danantara

SULTENG RAYA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebagai bagian dari Danantara terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra.

Kali ini, BRI dibawah koordinasi Danantara Indonesia dan dalam payung BUMN Peduli turut mendukung pembangunan Rumah Hunian Danantara (Huntara) yakni hunian layak sementara untuk memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Dukungan BRI beserta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lainnya pada pembangunan Huntara ini adalah dari sisi pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan logistik.

Pembangunan Huntara dimulai pada 24 Desember 2025 dan menunjukkan percepatan signifikan. Sebanyak 600 unit akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada 8 Januari 2026 untuk selanjutnya diberikan kepada warga terdampak.

Pembangunan akan dilanjutkan dengan target 15.000 unit dalam tiga bulan ke depan guna memastikan ketersediaan hunian layak sementara bagi keluarga yang terdampak secara langsung.

Seluruh Huntara dibangun sesuai standar kelayakan hunian darurat, mencakup struktur yang aman, akses air bersih, fasilitas sanitasi, pasokan listrik, serta dukungan layanan kesehatan. Kawasan hunian juga dilengkapi fasilitas umum seperti klinik, taman bermain, serta akses internet dan listrik tanpa biaya untuk menunjang aktivitas sosial masyarakat.

Pada kunjungannya ke Aceh Tamiang (1/1/2026), Presiden RI Prabowo mene-

gaskan bahwa tujuan negara adalah secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan masyarakat.

“Danantara Indonesia membuktikan bahwa kita bisa membangun 600 hunian, semua pihak telah bekerja dengan gemilang, dengan cepat,” tambah Presiden Prabowo.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pencapaian pembangunan Huntara hingga awal tahun ini tidak terlepas dari kerja keras dan sinergi lintas pihak, khususnya peran aktif BUMN dalam mendukung eksekusi di lapangan.

“Target pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh Tamiang ditetapkan secara jelas sejak awal, dan capaian hingga 1 Januari 2026 menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak untuk menepatinya. BUMN bergerak cepat, bekerja di lapangan dalam kondisi yang tidak mudah, untuk memastikan masyarakat segera mendapatkan hunian yang layak,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rosan menekankan bahwa Huntara bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan bagian dari tahapan pemulihan yang lebih besar.

“Huntara ini menjadi jembatan penting menuju fase hunian permanen dan pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, kualitas dan keberlanjutan tetap menjadi perhatian utama,” tambahnya.

Pembangunan tahap pertama Huntara merupakan hasil kolaborasi BUMN yang bergerak cepat di bawah koordinasi Danantara Indonesia dan program payung BUMN Peduli. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyediakan lahan untuk pembangunan, sementara

tujuh BUMN Karya terlibat dalam konstruksi ratusan unit Huntara dengan sistem percepatan dan modular—dipimpin oleh PT Utama Karya (Persero) sebagai koordinator lapangan, bersama PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT PP (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Nindya Karya (Persero). Dukungan infrastruktur dasar turut diperkuat oleh PT PLN (Persero) yang memastikan ketersediaan listrik, serta PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang menghadirkan konektivitas komunikasi di kawasan Huntara. Di sisi pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan logistik, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)—melalui Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI turut mengerahkan sumber daya untuk mempercepat pemulihan dan memastikan proses pembangunan berjalan berkelanjutan.

Dony Oskaria, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, menyoroti disiplin eksekusi dan intensitas kerja BUMN dalam mengejar target waktu yang ketat.

“Pembangunan Rumah Hunian Danantara dilakukan dalam rentang waktu yang sangat terbatas. BUMN bekerja dengan intensitas tinggi, melakukan percepatan konstruksi, pengadaan material, hingga pengawasan mutu secara simultan agar target dapat tercapai sebelum awal tahun,” jelasnya.

Menurut Dony, koordinasi erat antara Danantara Indonesia dan BUMN pelaksana, pemerintah daerah, dan kementerian menjadi faktor utama dalam menjaga progres pembangunan tetap sesuai rencana.



PRESIDEN Prabowo meninjau Pembangunan Huntara di Aceh. **FOTO: DOK. BRI**

“Ini adalah contoh konkret bagaimana BUMN menjalankan peran strategisnya sebagai perpanjangan tangan negara, bukan hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga pada kepentingan sosial dan kemanusiaan,” ujarnya.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa kontribusi BRI pada pembangunan Huntara ini merupakan bagian dari komitmen nyata BRI dalam mendukung pemulihan pascabencana.

“Sebagai bagian dari Danantara, BRI turut memberikan dukungan nyata dalam program ini guna mempercepat pemulihan dan rehabilitasi masyarakat di wilayah terdampak bencana,” jelasnya.

Kawasan Huntara sendiri dilengkapi berbagai sarana dan prasarana pendukung, antara lain toilet, fasilitas sanitasi, serta fasilitas ibadah seperti mushola dan fasilitas pendukung lainnya guna menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat.

“Huntara memiliki fungsi penting sebagai tempat tinggal transisi yang aman, layak, dan manusiawi bagi masyarakat terdampak bencana. Melalui kontribusinya dalam pembangunan Huntara ini, BRI berharap dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar tempat tinggal sambil men-

unggu proses pembangunan hunian permanen,” ujar Dhanny.

Sebelumnya, BRI Group telah melaksanakan 40 aksi tanggap darurat di berbagai wilayah Sumatera dengan dukungan 10 unit posko bencana. Bantuan yang disalurkan meliputi 6.500 paket makanan siap santap, 85.000 paket sembako, 950 paket survival kit, serta dukungan logistik berupa 600 unit hunian sementara (huntara), 10 tenda dan 1.680 unit kasur serta selimut. Untuk mendukung aspek kesehatan dan sanitasi, BRI Group juga mendistribusikan 33 truk air bersih, 4.850 paket obat-obatan, dan 7.000 unit peralatan kebersihan, serta mengerahkan 5 unit perahu karet untuk menjangkau wilayah terdampak banjir. Secara keseluruhan, program ini telah menjangkau 100.250 jiwa penerima manfaat.

Di samping itu, sejumlah posko bencana yang didirikan BRI juga dilengkapi dengan layanan kesehatan dasar, dapur umum, distribusi logistik, serta program Trauma Healing Anak yang dilaksanakan secara rutin bekerja sama dengan mitra komunitas.

Kehadiran posko ini diharapkan dapat menjadi pusat pemulihan terpadu bagi masyarakat, khususnya anak-anak, pada masa-masa krusial pascabencana. **KH**



REFLEKSI AKHIR TAHUN

Momentum Strategis Pelindo Lakukan Evaluasi dan Perkuat Sinergi



SUASANA Kegiatan Refleksi Akhir Tahun PT Pelindo, Rabu (31/12/2025). FOTO: DOK. PT PELINDO

SULTENG RAYA – Menutup tahun 2025 sekaligus menyongsong tahun baru 2026, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menggelar kegiatan “Refleksi Akhir Tahun 2025 dan Menyongsong Harapan Baru 2026” yang berlangsung di Makassar,

Rabu (31/12/2025). Kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi Pelindo untuk melakukan evaluasi kinerja, memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan, serta menegaskan komitmen perusahaan dalam menghadapi tantangan dan pelu-

ang industri kepelabuhanan ke depan. Kegiatan refleksi akhir tahun ini dihadiri oleh jajaran Komisaris, Direksi, dan Manajemen Pelindo Group, seluruh pengelola Terminal Peti Kemas Pelindo Group yang diikuti secara hybrid, serta para stakeholder, aso-

siasi, dan pengguna jasa pelabuhan. Di mana kehadiran lintas elemen ini mencerminkan semangat kolaborasi Pelindo dalam membangun ekosistem kepelabuhanan nasional yang terintegrasi, andal, dan berdaya saing global. Rangkaian kegiatan dia-

wali dengan CEO Direction yang disampaikan oleh Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono. Dalam arahnya, Arif menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi fase penting bagi Pelindo dalam memperkuat fondasi transformasi pascamerger, khususnya pada aspek standarisasi layanan, integrasi sistem, peningkatan kinerja operasional, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada keselamatan, integritas, dan pelayanan prima. “Refleksi akhir tahun bukan hanya tentang melihat ke belakang, tetapi juga memastikan bahwa setiap pembelajaran di tahun 2025 menjadi pijakan kuat untuk melangkah lebih maju di tahun 2026. Pelindo harus terus bergerak adaptif, inovatif, dan kolaboratif agar mampu menjawab dinamika global dan kebutuhan pengguna jasa,” ujar Arif.

Dia juga menekankan pentingnya peran sumber daya manusia sebagai motor penggerak transformasi. Menurutnya, kinerja Pelindo tidak hanya diukur dari capaian operasional dan finansial, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan mampu menghadirkan manfaat sosial bagi masyarakat serta membangun kepercayaan publik melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai wujud komitmen tersebut, dalam rangkaian kegiatan refleksi akhir tahun ini, Pelindo juga melaksanakan agenda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Agenda TJSL ini meliputi Bantuan Renovasi Panti Asuhan dan Santunan kepada Anak Yatim Piatu, sebagai bagian dari kontribusi nyata Pelindo dalam mendukung kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya di wilayah sekitar pelabuhan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan pe-

rusahaan sepanjang tahun 2025 sekaligus memohon kelancaran dan keberkahan dalam mengarungi tahun 2026. Suasana khidmat dan penuh kebersamaan menjadi refleksi nilai spiritual yang terus dijaga Pelindo dalam menjalankan perannya sebagai BUMN strategis.

Rangkaian acara berlanjut dengan Showcase Remote Planning and Control (PnC) Makassar New Port (MNP). Dalam sesi ini, para peserta mendapatkan gambaran langsung mengenai sistem perencanaan dan pengendalian operasional yang diterapkan di Makassar New Port sebagai salah satu proyek strategis nasional Pelindo.

Showcase remote ini menegaskan komitmen Pelindo dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta keandalan layanan kepelabuhanan.

Selain itu, Pelindo juga menggelar diskusi dan interaksi dengan seluruh terminal peti kemas Pelindo Group secara hybrid. Forum ini menjadi wadah berbagi praktik terbaik, menyelaraskan strategi operasional, serta memperkuat koordinasi lintas wilayah dalam menghadapi tantangan logistik nasional dan global. Diskusi yang melibatkan stakeholder, asosiasi, dan pengguna jasa pelabuhan ini diharapkan mampu menghasilkan masukan konstruktif bagi peningkatan kualitas layanan Pelindo ke depan.

Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Makassar sebagai hub strategis Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas logistik nasional. Oleh karena itu, sinergi antara Pelindo, pengguna jasa, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjaga kelancaran

dan keberlanjutan operasional pelabuhan.

“Refleksi akhir tahun ini menjadi ruang konsolidasi sekaligus penguatan komitmen bersama. Kami di Regional 4 siap mendukung arah kebijakan perusahaan dengan terus meningkatkan kualitas layanan, keselamatan kerja, serta kolaborasi dengan stakeholder dan customer pelabuhan,” ungkap Abdul Azis.

Dia juga menambahkan bahwa transformasi yang dijalankan Pelindo tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan sistem, proses bisnis, dan budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan.

Memasuki sesi berikutnya, kegiatan dilanjutkan dengan Leadership Talk yang menghadirkan dialog inspiratif antara pimpinan dan insan Pelindo. Sesi ini menjadi ruang interaksi terbuka untuk membahas tantangan kepemimpinan, pengembangan sumber daya manusia, serta pentingnya nilai integritas, kolaborasi, dan inovasi dalam menghadapi tahun 2026.

Rangkaian kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 dan Menyongsong Harapan Baru 2026 kemudian ditutup dengan malam ramah tamah yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Momen ini menjadi simbol soliditas Pelindo Group dalam menatap masa depan dengan semangat baru, optimisme, dan tekad untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara melalui sektor kepelabuhanan.

Melalui kegiatan ini, Pelindo berkomitmen untuk terus tumbuh berkelanjutan, menghadirkan layanan kepelabuhanan yang andal dan berdaya saing, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian nasional di tahun 2026 dan seterusnya. *WAN

GUBERNUR dari halaman1

tangani oleh operator Command Center. Namun, jika laporan berkaitan dengan persoalan teknis atau kewenangan OPD tertentu, seperti perizinan dan layanan sektoral, laporan akan diteruskan kepada OPD terkait. Untuk mendukung hal tersebut, setiap OPD telah menyiapkan operator khusus. Sistem ini juga dilengkapi dengan klasifikasi status laporan, mulai dari menunggu, dalam progres, selesai, hingga ditolak. Fitur penolakan disiapkan untuk menyaring laporan yang tidak relevan atau bersifat iseng, sehingga pelayanan tetap fokus dan efektif. Guna memastikan keadilan dan profesionalisme, Command Center BERA-

NI Samporoa dilengkapi scoring system bagi operator Command Center dan operator OPD. Sistem ini mengukur kecepatan dan kualitas tindak lanjut laporan, sehingga tidak terjadi saling lempar tanggung jawab. Untuk operator Command Center, waktu respons ditetapkan mulai dari 5 menit hingga maksimal 60 menit per laporan. Sementara itu, penilaian bagi OPD disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas masing-masing layanan. Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa keberhasilan Command Center BERANI Samporoa sangat ditentukan oleh validitas data yang dimiliki perangkat daerah.

“Secanggih apa pun sistem ini, kalau datanya tidak valid, maka tidak akan efektif. Karena itu saya meminta seluruh pimpinan OPD dalam tiga bulan ke depan serius melakukan pembenahan dan pembaruan data,” tegas Gubernur. Ia juga menyampaikan harapan agar ke depan Command Center ini dapat terhubung dengan pemerintahan kabupaten/kota hingga instansi vertikal, sehingga laporan masyarakat yang berada di luar kewenangan provinsi tetap dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Nama Samporoa, yang berarti berteman, dipilih sebagai simbol kedekatan pemerintah dengan masyarakat. Melalui layanan

ini, masyarakat diharapkan merasa memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan persoalan secara terbuka. “Command Center ini adalah pusat kendali pelayanan kita. Ibarat tubuh manusia, inilah otaknya. Mari kita jaga dan manfaatkan bersama demi pelayanan publik yang semakin baik,” ujar Gubernur. Peresmian Command Center BERANI Samporoa ditandai dengan prosesi launching melalui layar sentuh oleh Gubernur Sulawesi Tengah, didampingi Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Kepala Dinas Kominfo, sebagai tanda dimulainya operasional layanan publik digital tersebut.*WAN

PEMKAB dari halaman1

warga Aceh dan Sumatera banyak memberikan bantuan kepada kita,” kata Vera saat ditemui awak media di Banawa, Kamis.

Ia mengemukakan agar seluruh PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala untuk berpartisipasi aktif dalam penggalangan donasi bertema kan Charity for Aceh dan Sumatera.

“Jadi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana banjir di Aceh, Sumut dan Sumbat. Saya menginstruksikan ASN di Donggala untuk ikut mendonasikan uang

sebesar Rp20.000 per orang bagi saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera,” ucapnya.

Menurut dia, ajakan untuk berdonasi itu juga berlaku untuk masyarakat umum sehingga bisa ikut memberikan kontribusi dan meringankan beban korban bencana tersebut.

“Alhamdulillah kegiatan penggalangan dana untuk korban banjir ini juga dirangkaikan dengan doa bersama lintas agama yang diikuti unsur Forkopimda sebagai simbol solidaritas spiritual bagi seluruh korban bencana di Aceh dan

Sumatera,” sebutnya. Diketahui jumlah donasi yang terkumpul pada perayaan malam tahun baru itu mencapai Rp300 juta.

Penggalangan donasi pun dilakukan secara digital menggunakan QRIS maupun metode konvensional.

“Melalui festival ini, pemerintah daerah menunjukkan perayaan akhir tahun tidak hanya tentang hiburan, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk menumbuhkan empati, solidaritas, dan kepedulian kemanusiaan,” kata dia. *ANT

LAKALANTAS dari halaman1

Sepanjang 2025, Satlantas Polres Parigi Moutong menangani 136 kasus kecelakaan lalu lintas, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 140 kasus.

Namun, kerugian materiil justru meningkat signifikan, dari Rp512.200.000 pada 2024 menjadi Rp665.030.000 di tahun 2025.

“Ini menunjukkan bahwa dampak kecelakaan tidak hanya pada keselamatan jiwa, tetapi juga kerugian ekonomi yang cukup besar,” jelas Kapolres.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Parigi Moutong, IPTU Dwiwahyu Sagita Ramadhan, S.Tr.K., melaporkan secara rinci penanganan perkara kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2025.

Dari 136 perkara, terdapat satu perkara P21, 46 perkara SP3, dan 78 perkara diselesaikan melalui restorative justice (RJ). Selain itu, enam kasus masih dalam proses, empat di antaranya mengarah pada penyelesaian kekeluargaan, sementara dua kasus lainnya dilanjutkan ke tahap penyidikan.

“Dua kasus yang kami proses hingga penyidikan terjadi di TKP Boyantongo dengan korban Warga Negara Asing, serta satu kasus lainnya di Desa Sausu Taliabo,” terang Kasat Lantas.

Berdasarkan data usia korban kecelakaan lalu lintas selama tahun 2025, kelompok usia produktif masih mendominasi.

Rinciannya, usia 5–15 tahun sebanyak 21 orang, 16–25 tahun sebanyak 18 orang, 26–30 tahun mencapai 112 orang, 31–40 tahun 25 orang, 41–50 tahun 29 orang, dan usia di atas 51 tahun sebanyak 68 orang.

“Ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa pengguna jalan dari berbagai usia, khususnya usia produktif, masih sangat rentan terhadap kecelakaan,” ujar IPTU Dwiwahyu.

Kasat Lantas juga mengungkap sejumlah titik rawan kecelakaan di wilayah Parigi Moutong, di antaranya Desa Sausu Taliabo, Kecamatan Sausu, karena kondisi jalan yang sempit dan rusak. Selain itu, Kecamatan Tinombo Selatan juga menjadi daerah rawan karena jalan yang lebar

dan mulus justru membuat pengendara lengah, serta wilayah Kecamatan Moutong.

Untuk daerah rawan banjir dan longsor, Satlantas mencatat Jalan Trans Sulawesi Desa Suli Kecamatan Balinggi, Km 8 Jalur Kebun Kopi Desa Toboli Barat Kecamatan Parigi Utara, serta jalan Pasir Putih Desa Tinombala Kecamatan Mepanga.

“Untuk jalur rawan pohon tumbang berada di Jalan Trans Sulawesi jalur Kebun Kopi Km 5, 7, 8, dan 11 Desa Toboli Barat. Kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati, terutama saat hujan dan angin kencang,” tegasnya.

Sebagai Kasat Lantas yang baru menjabat, IPTU Dwiwahyu menegaskan komitmennya untuk menekan angka kecelakaan melalui program edukasi ke sekolah-sekolah.

“Kami akan mengintensifkan edukasi tertib berlalu lintas melalui Kemit Kamsel, sekaligus mengimbau orang tua agar tidak mengizinkan anak-anak membawa sepeda motor ke sekolah,” pungkasnya. *ANT

KEMENKUM dari halaman1

Ia menegaskan Kemenkum Sulteng siap memastikan seluruh proses pendaftaran IG berjalan terarah sesuai standar nasional.

Sementara itu, Yayasan Ekologi Nusantara Lestari (Ekonesia) bersama BAPPE-RIDA Kabupaten Sigi telah melaksanakan kajian IG Kopi Arabika Dombu Sigi.

Berdasarkan hasil riset, cakupan nama Indikasi Geografis meliputi green beans, roasted beans, dan grounded coffee yang seluruhnya berasal dari tiga wilayah

utama, yakni Desa Dombu, Desa Lewara, dan Desa Soi di Kabupaten Sigi.

Kopi Arabika Dombu Sigi tercatat memiliki nilai final score sebesar 83,3, sehingga masuk kategori kopi kualitas premium dan berpotensi kuat menembus pasar nasional maupun internasional.

Selain itu, hasil penelitian juga mencatat karakteristik tanah di wilayah penghasil Kopi Arabika Dombu Sigi memiliki pH sebesar 5,47 yang dinilai ideal untuk budidaya kopi arabika.

Seluruh hasil kajian telah diunggah ke dalam dokumen deskripsi Indikasi Geografis dan telah diterima secara resmi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kakanwil menjelaskan penguatan Masyarakat Perlingungan Indikasi Geografis (MPIG) dan penerapan SOP yang konsisten akan menjadi kunci agar Kopi Arabika Dombu Sigi benar-benar diakui sebagai produk berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Ia menyebut MPIG men-

jadi langkah strategis untuk menjaga mutu, identitas, dan keberlanjutan Kopi Arabika Dombu Sigi. Selain itu, penerapan SOP mulai dari proses panen hingga pengolahan menjadi produk siap jual penting untuk memastikan konsistensi kualitas produk.

“Kami siap mendampingi hingga pendaftaran IG rampung, yang diharapkan dapat memperkuat posisi komoditas lokal Sulawesi Tengah di tingkat nasional maupun global,” ujarnya. ANT

layanan yang aman dan berkelanjutan.

“Bagi Kami, listrik bukan sekadar layanan, tetapi fondasi aktivitas sehari-hari masyarakat. Karena itu, kami memastikan pasokan listrik terus andal dan layanan terus ditingkatkan, agar masyarakat dapat menjalani awal tahun dengan lebih tenang dan produktif,” tutup Darmawan. *WJ

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengelola pengeluaran di awal tahun, sehingga daya beli tetap terjaga dan stabilitas ekonomi nasional dapat dipertahankan.

Mendukung kebijakan tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa keputusan tarif listrik Triwulan I 2026 yang tidak

mengalami kenaikan akan memberikan ruang bagi masyarakat dan UMKM untuk mengelola pengeluaran dengan lebih baik di awal tahun, ketika aktivitas rumah tangga dan usaha kembali berjalan.

“Awal tahun cenderung diiringi berbagai kebutuhan rumah tangga dan aktivitas usaha yang kembali berjalan. Dengan tarif listrik

yang tidak naik, masyarakat memiliki kepastian dalam mengatur pengeluaran sehingga daya beli dapat tetap terjaga,” ujar Darmawan.

Ia menegaskan, pihaknya senantiasa berkomitmen menjaga pasokan listrik tetap andal, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional agar seluruh pelanggan dapat menikmati

Peringati HAB ke-80,
Kanwil Kemenag Sulteng Ziarah
dan Tabur Bunga di TMP



KEPALA Kanwil Kemenag Sulteng, Dr. H. Junaidin, S.Ag., M.A. menaburkan bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP), Jumat (2/1/2026). FOTO: HUMAS

SULTENG RAYA – Dalam rangka memeringati Hari Amal Bhakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP), Jumat (2/1/2026).

Upacara ziarah berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Sulteng, Dr. H. Junaidin, S.Ag., M.A. Kegiatan diawali dengan upacara penghormatan di TMP, dilanjutkan dengan tabur bunga sebagai simbol penghormatan dan doa kepada para pahlawan yang telah gugur.

Selain berziarah ke TMP, rombongan Kanwil Kemenag Sulteng juga mengunjungi makam sejumlah tokoh penting yang memiliki kontribusi besar bagi kehidupan keagamaan dan pendidikan di Sulawesi Tengah. Di antaranya Makam Pendiri Perguruan Islam Alkhairaat, Guru Tua (Habib Sayid Idrus bin Salim Aljufri), serta makam mantan Kepala Kanwil Kemenag Sulteng yang telah wafat.

Kepala Kanwil Kemenag Sulteng, Dr. H. Junaidin, mengatakan kegiatan ziarah ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus refleksi atas jasa para pahlawan dan tokoh agama yang telah berjasa membangun bangsa dan pelayanan keagamaan

di daerah.

"Ziarah ini adalah bentuk penghormatan dan refleksi kita dalam mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan, serta menghadirkan kembali memori perjuangan para tokoh agama, pendidik, dan pimpinan Kemenag yang telah meletakkan pondasi pelayanan keagamaan di Sulawesi Tengah. Semoga warisan keteladanan mereka terus menginspirasi kita dalam mengabdikan," ujar Junaidin.

Ia menambahkan, kegiatan ini sejalan dengan tema HAB ke-80 Kementerian Agama, yakni "Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju," yang menekankan pentingnya penguatan kerukunan umat beragama, sinergi antar lembaga, serta komitmen Kemenag dalam menghadirkan pelayanan publik yang berintegritas.

Sebagai informasi, upacara puncak peringatan Hari Amal Bhakti ke-80 Kementerian Agama akan dilaksanakan pada Sabtu, 3 Januari 2026, bertempat di halaman Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ziarah tersebut diikuti oleh pejabat administrator Kanwil Kemenag Sulteng, Kepala Kantor Kemenag Kota Palu, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kanwil dan Kemenag Kota Palu, serta anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag Sulawesi Tengah. *ENC

SULTENG RAYA—Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid didampingi Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, bersama pejabat terkait lainnya, secara simbolis meresmikan penggunaan Gedung Baruga Lapangan Vatulemo, Kota Palu, pada Jumat (2/1/2026).

Gedung tiga lantai tersebut resmi dibuka dan mulai difungsikan sebagai etalase produk lokal yang diharapkan menjadi pusat promosi sekaligus pengembangan usaha masyarakat.

Peresmian ini menandai komitmen Pemerintah Kota Palu dalam memperkuat promosi produk daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Palu.

Pada lantai pertama, Gedung Baruga difungsikan sebagai pusat penjualan produk makanan, jajanan, serta aneka oleh-oleh khas Kota Palu.

Sementara itu, lantai kedua menghadirkan beragam produk olahan industri kreatif, mulai dari kerajinan lokal, fashion, furniture, hingga souvenir.



WALI Kota Palu meresmikan New Baruga sebagai toko produk IKM Kota Palu, Jumat (2/1/2026). FOTO PPID KOMINFO PALU

Adapun lantai ketiga disiapkan sebagai walking space yang terbuka untuk umum dan dapat dimanfaatkan sebagai ruang kegiatan komunitas, pameran, hingga berbagai aktivitas kreatif lainnya.

Selain itu, area rooftop juga dimanfaatkan sebagai ruang santai bagi pengunjung. Menambah daya tarik gedung, turut hadir brand kopi ternama Kopi Kenangan yang beroperasi di lantai

dua.

Kehadiran tenant tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan masyarakat sekaligus menghidupkan kawasan Gedung Baruga.

Wali Kota Hadianto menyampaikan bahwa Gedung Baruga diharapkan menjadi ruang pemantik lahirnya lebih banyak produk lokal berkualitas.

"Gedung Baruga akan menjadi embrio atau pe-

mantik bagi produk-produk lokal di luar sana," ungkap Wali Kota.

Menurut wali kota, Gedung Baruga tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjajakan produk, tetapi juga sebagai ruang pembinaan dan penguatan usaha bagi pelaku UMK dan IKM.

"Silakan ke inkubator bisnis yang ada di Gedung Baruga ini bagi masyarakat yang ingin mendapatkan

modal usaha, yang ingin mendapatkan suport pemerintah, baik itu UMK maupun IKM," ujar Wali Kota.

Dengan beroperasinya Gedung Baruga sebagai etalase produk lokal sekaligus inkubator bisnis, Pemerintah Kota Palu berharap pelaku UMK semakin mudah memasarkan produk, memperluas jaringan usaha, serta memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *BS

Bawaslu-KPU Terima 2 Mobil Dinas dari Pemkot Palu

SULTENG RAYA—Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, secara simbolis menyerahkan dua unit mobil operasional kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, pada Jumat (2/1/2026) di halaman Kantor Wali Kota Palu.

Penyerahan kendaraan operasional tersebut merupakan bentuk dukungan nyata Pemerintah Kota Palu terhadap kelancaran tugas penyelenggara dan pengawas pemilu di daerah, khususnya dalam menunjang mobilitas dan koordinasi di lapangan.

Wali Kota Hadianto menyampaikan bahwa keberadaan mobil operasional ini diharapkan dapat memperkuat kinerja Bawaslu dan KPU, sekaligus



PENYERAHAN kendaraan operasional antara Pemkot Palu ke Bawaslu dan KPU Palu, Jumat (02/01/2026). FOTO PPID KOMINFO PALU

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam setiap tahapan demokrasi.

Kepala Bawaslu Kota Palu, Agusssalim Wahid, menyampaikan apresiasi

dan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kota Palu atas bantuan yang diberikan.

"Terima kasih kepada Pemkot Palu atas dukungan dalam bentuk bantuan

mobil operasional," ungkap Agusssalim.

Ia menambahkan bahwa selama ini Bawaslu Kota Palu menghadapi keterbatasan sarana transportasi dalam menjalankan tugas

pengawasan di lapangan.

"Selama ini Bawaslu memang kekurangan kendaraan operasional, sehingga bantuan ini sangat membantu dalam menunjang tugas kami di lapangan," ujarnya.

Pemerintah Kota Palu menegaskan bahwa dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memastikan seluruh tahapan demokrasi di Kota Palu dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan transparan.

Prosesi penyerahan berlangsung secara sederhana dan khidmat, ditandai dengan serah terima kunci kendaraan serta penandatanganan berita acara, yang disaksikan oleh jajaran pemerintah daerah serta perwakilan dari Bawaslu dan KPU Kota Palu. *BS

Tutup Tahun 2025, Universitas Tadulako Lantik Pejabat Baru



REKTOR Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T. menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan pejabat di Media Center Untad Lantai III, Rabu (31/12/2025). FOTO: HUMAS

SULTENG RAYA—Menutup rangkaian kegiatan akademik dan kelembagaan tahun 2025, Universitas Tadulako (Untad) melaksanakan pelantikan pejabat baru, pengambilan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta serah terima

jabatan di lingkungan universitas. Kegiatan tersebut berlangsung di Media Center Untad Lantai III, Rabu (31/12/2025).

Pelantikan meliputi pengangkatan Prof. Dr. Ir. I Wayan Sutapa, M.Eng. sebagai Direktur Program Pascasar-

jana Universitas Tadulako masa jabatan 2025–2027. Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan serah terima jabatan Dekan Fakultas Kehutanan dari Prof. Dr. Golar, S.Hut., M.Si. kepada Prof. Dr.sc.agr. Yusran, S.P., M.P. sebagai dekan periode

2025–2027.

Rangkaian acara diawali dengan pengambilan sumpah jabatan PNS yang dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T. Prosesi tersebut disaksikan Ketua Senat Universitas

Tadulako, Prof. Dr. Djayani Nurdin, S.E., M.Si., serta Ketua Dewan Pertimbangan Untad, Prof. Ir. Zainuddin, Ph.D.

Usai pelantikan Direktur Program Pascasarjana dan serah terima jabatan Dekan Fakultas Kehutanan,

kegiatan dilanjutkan pada pukul 14.00 WITA dengan pelantikan pejabat struktural lainnya.

Rektor melantik Prof. Dr. I Wayan Sudarsana, S.Si., M.Si. sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana Untad, serta Prof. Dr. Muhtar Lutfi, S.E., M.Si. sebagai Wakil Direktur Bidang Keuangan Program Pascasarjana Untad untuk periode 2025–2027.

Selain itu, jajaran pimpinan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako turut dilantik, yakni Dr. Sudirman Dg. Massiri, S.Hut., M.Sc. sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Ir. Hendra Pribadi, S.P., M.P. sebagai Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum, serta Dr. Moh. Ihsan, S.Hut., M.Si. sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni periode 2025–2027.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Tadulako menegaskan bahwa universitas merupakan rumah bersama yang harus dijaga, dirawat, dan dikembangkan secara kolektif oleh seluruh sivitas akademika. Ia menekankan bahwa jabatan struktural bukan sekadar

posisi administratif, melainkan amanah kepemimpinan yang menuntut kolaborasi, keteladanan, dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika kebijakan pendidikan tinggi.

Rektor juga menyinggung sejumlah agenda strategis, di antaranya penguatan tata kelola teknologi informasi melalui Sistem Informasi Global Akses (SIGA 8), percepatan penyelesaian nilai akademik mahasiswa, serta konsistensi dalam menjaga mutu akademik. Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam mendorong pencapaian akreditasi unggul hingga akreditasi internasional, baik pada tingkat program studi maupun institusi.

Pada kesempatan itu, Rektor menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan. Kepada pejabat yang baru dilantik, ia berpesan agar senantiasa sigap, adaptif, dan cermat dalam menyikapi dinamika regulasi kementerian, guna menjaga stabilitas, kredibilitas, dan reputasi Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi negeri yang unggul. *ENC